



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya akhirnya pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2021. Capaian kinerja Tahun 2021 tersebut diperbandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur diharapkan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efisien dan efektif, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. Selain itu, sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Samarinda, Februari 2022

Kepala Dinas,



H. MUHAMMAD FAISAL, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199402 1 001



BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur merupakan unsur pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur melalui Sekretaris Daerah. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka urusan bidang Komunikasi dan Informatika serumpun dengan urusan Persandian dan Statistik, dan dijelaskan pula dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan perumpunan ini menimbulkan konsekuensi perubahan tugas dan fungsi Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika dan Perka Lemsaneg nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Kominfo Prov. Kaltim) merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kominfo Prov. Kaltim dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, serta bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas lainnya. Dukungan Teknologi Informasi Komunikasi bagi Pemerintah Daerah diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai tugas dan fungsinya.

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan dibantu oleh seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang yang masing-masing membawahi tiga Kepala Seksi/Kasubbag (terlihat pada gambar dibawah ini :



- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, Aplikasi Informatika dan Statistik.
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Kominfo sesuai dengan lingkup tugasnya. Dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Sekretaris Dinas mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset., dengan dibantu:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- b. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat..
- c. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan, dengan dibantu:

- 1. Seksi Monitoring Opini dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi monitoring opini dan pengelolaan media komunikasi publik.;
- 2. Seksi Pelayanan Informasi dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan



kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi pelayanan informasi dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.;

3. Seksi Kemitraan Media Komunikasi Publik, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi kemitraan media komunikasi publik.

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian, dengan dibantu:

1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian meliputi infrastruktur teknologi informasi komunikasi;
2. Seksi Pengelolaan Data dan Intergrasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi pengelolaan data dan integrasi sistem informasi
3. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian yang meliputi keamanan informasi dan persandian.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang Aplikasi Informatika, dengan dibantu:

1. Seksi Pengelolaan Domain dan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan domain dan aplikasi.



2. Seksi Pengelolaan *e-Government* mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengelolaan e-government;
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis dan pengendalian terhadap pengembangan sumber daya teknologi informasi komunikasi.

Kepala Bidang Statistik, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang Statistik, dengan dibantu:

1. Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Sosial;
2. Seksi Statistik Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Ekonomi;
3. Seksi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengaturan teknis Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh 113 orang pegawai terdiri dari 51 orang Pegawai Negeri Sipil dan 62 orang Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Kontrak) yang ditempatkan di semua Bidang-Bidang. Untuk 51 Orang PNS berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut:

Tabel 2.3
Data Aparatur Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Tahun 2023

No	Jabatan	Pangkat / Golongan	Pendidikan	JENIS KELAMIN	
				Laki2	Perempuan
1	Kepala	Pembina Utama Muda/ IV-c	S2	1	



	Dinas				
2	Sekretaris	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	1	
3	Kepala Bidang	Pembina Tk. I/ IV-b	S2	2	
		Pembina/ IV-a	S2		2
4	Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I/ III-d	S2	1	
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1	
		Penata / III-c	S2		
		Penata / III-c	S1		1
5	Kepala Seksi	Pembina Tk. I/ IV-b	S1		
		Pembina/ IV-a	S2	1	
		Penata Tk. I/ III-d	S2	4	1
		Penata Tk. I/ III-d	S1	1	2
		Penata / III-c	S2	1	1
		Penata / III-c	S1		
6	Staf	Pembina Tk. I/ IV-b	S1		
		Penata Tk. I / IV-a	S2		
		Penata Tk. I / III-d	S1	1	
		Penata /III-c	S2	1	
		Penata /III-c	S1	2	
		Penata Muda Tk.I/ III-b	S2	1	
		Penata Muda Tk.I/ III-b	S1	4	1
		Penata Muda Tk.I/ III-b	D3		2



	Penata Muda Tk. I/ III-b	SMA	3	1
	Penata Muda/ III-a	S1		1
	Penata Muda/ III-a	D3	1	
	Penata Muda/ III-a	SLTA	2	1
	Pengatur Tk. I/ II-d	D3		
	Pengatur Tk. I/ II-d	SLTA	3	
	Pengatur/ II-c	D3	1	1
	Pengatur/ II-c	SLTA	1	2
	Pengatur Muda Tk. I/ II-b	SLTA	2	
	Pengatur Muda/ II-a	SMA		
	Pengatur Muda/ II-a	SLTP		
	Pengatur Muda/ II-a	SD		
	Total	51	35	16

Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun Perjanjian Kinerja yang memuat Indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, berikut dijabarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

C. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarkan informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang. Peran Dinas Kominfo Prov. Kaltim di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi



(TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Kalimantan Timur. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :
 - a) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar ruang.
 - b) Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui pembangunan telecenter di kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
3. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik.
4. Pengendalian bandwidth dan pendistribusian SKPD oleh Dinas Kominfo Prov. Kaltim.
5. Pembangunan Data Center.
6. Dialog interaktif.

D. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Permasalahan utama yang dihadapi dalam mendukung visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

1. Implementasi SPBE belum optimal.
2. Tuntutan publik terhadap keterbukaan Informasi semakin tinggi.

Sehingga akar permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan pembangunan Teknologi Informatika dan komunikasi ke depan adalah:

1. Belum adanya tata kelola SPBE yang terpadu
2. Belum diterapkannya SPBE pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan layanan publik.
3. Jangkauan infrastruktur TIK seluruh wilayah dan semua lapisan masyarakat belum optimal.



4. Keterbatasan jumlah ASN yang memiliki kompetensi TIK.
5. Belum terstandarisasinya sistem keamanan informasi elektronik (TIK).
6. Masih tingginya konten hoax yang beredar di media sosial dan aplikasi pesan instan.
7. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam menyikapi hoax.

E. Sarana dan Prasarana Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sarana dan prasarana, antara lain:

Tabel 1.6. Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah	2.242	m ²
2	Gedung	2	Unit (2 Lantai)
3	Listrik	3	Jaringan
4	Air	2	Jaringan
5	Telepon	2	Line (1 Fax)
8	Area Parkir	1	Area
9	Ruang Rapat	2	Ruang
10	Ruang Arsip	1	Ruang
11	Ruang CS	1	Ruang
12	Komputer	72	Unit
13	Laptop	69	Unit
14	Ruang Persediaan	1	Ruang
15	Ruang Pengadaan	1	Ruang
16	Mobil Dinas	5	Unit
17	Mobil operasional	8	Unit



18	Motor Dinas	7	Unit
19	Kantin	1	Buah
20	Website	1	Buah
21	Papan Pengumuman	1	Buah
22	LED Display	2	Buah
23	Mushola	1	Unit



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategi instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategisnya yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Rencana Strategis Diskominfo tahun 2019 – 2023 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus bidang Informasi Komunikasi Publik, Teknologi Informasi Komunikasi, Aplikasi Informatika, Pengawasan dan Pengendalian.

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa adalah Program Diskominfo yang merupakan salah satu dari sekian program prioritas Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2023.

Visi Diskominfo merupakan upaya penjabaran dari visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun kedepan yaitu:



"TERWUJUDNYA AKSES KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG BERKUALITAS DI WILAYAH KALIMANTAN TIMUR."

Maksud dari visi diatas adalah "Terwujudnya akses komunikasi dan informatika yang berkualitas" memiliki arti teknologi informasi merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan, karena dengan teknologi informasi dapat memberikan efisiensi dalam system pembangunan serta masyarakat harus mendapatkan informasi yang akurat dan berkualitas, disamping itu harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Kemudian visi tersebut dijabarkan kedalam misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, yaitu:

1. Mengedepankan aspek system pelayanan publik yang professional dan berkualitas serta berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
2. Peyediaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkualitas.



TABEL 2. PERENCANAAN STRATEGIS

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN S/D TH.2018	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
						2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien berorientasi pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks		2,66	2,82	3,24		
		Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	Persentase Peningkatan Pemanfaatan teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	Persentase					80%	85%



TABEL 2.1. PROGRAM PRIORITAS DAN KEGIATAN PENDUKUNGNYA

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PROGRAM	KEGIATAN		
Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien berorientasi pelayanan publik	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
						2	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi



B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur yang mengindikasikan pencapaian kinerja paling utama sebuah instansi pemerintah. IKU Dinas Komunikasi dan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerjaUtama	Satuan	Penjelasan (FormulasiPerhitungan)	Sumber Data	PenanggungJawab
1.	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks /Predikat SPBE	$\frac{n 1}{n 0} \times 100\%$ <p>Dimana:</p> <p>n 1 = Nilai Indeks SPBE n 0 = Nilai ambang bawah indeks/ predikat SPBE yang ditetapkan:</p> <p>a. 4,2 = Memuaskan b. 3,5 = SangatBaik c. 2,6 = Baik d. 1,8 = Cukup e. 0 = Kurang</p>	Hasil Evaluasi SPBE dari Kemenpan RB.	Dinas Komunikasi dan Informatika



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.24



1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp29.770.575.464,- dengan rincian Belanja Operasi Rp 27.842.985.484,- dan Belanja Mesin Rp1.927.589.980,-.

2. Target Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Tabel 2.4. Target Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021		
		ANGGARAN BELANJA (RP)	REALISASI BELANJA (RP)	%
1	Belanja Operasi	27.842.985.484	25.243.191.131	92,31
2	Belanja Mesin	1.927.589.980	1.920.252.400	99,62
JUMLAH		29.770.575.464	27.163.443.531	91,24

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No.	SasaranStrategis	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	5.035.579.830	100%	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2020

1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 57,29 atau dengan predikat penilaian CC (Cukup/Memadai) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 dan 2020

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai 2019	Nilai 2020	Peningkatan/ Penurunan Capaian
1	Perencanaan Kinerja	30	20,14	20,08	-0,06
2	Pengukuran Kinerja	25	10,94	11,25	0,31
3	Pelaporan Kinerja	15	10,87	10,87	0,00
4	Evaluasi Internal	10	2,21	2,21	1,88
5	Pencapaian Kinerja	20	11,00	12,88	1,62
	Nilai Hasil Evaluasi	100	55,15	57,29	2,13
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	

2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
1	<p>Perencanaan Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renstra seharusnya telah menyajikan IKU • Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) seharusnya memenuhi kriteria indicator kinerja yang baik; • Target kinerja seharusnya ditetapkan dengan baik; • Program/kegiatan seharusnya digunakan sebagai cara untuk mencapai untuk tujuan/sasaran/hasil program/kegiatan; • Dokumen Renstra seharusnya selaras dengan Dokumen RPJMD • Dokumen Renstra seharusnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan; • Target jangka menengah dalam Renstra seharusnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan; • Dokumen Renstra 	<ul style="list-style-type: none"> • Program/tujuan telah disusun selaras dengan tujuan dan sasaran. • Telah dilakukan review terhadap renstra agar selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, tugas dan fungsi dan menggambarkan core bussines dan isu strategis yang berkembang di daerah. • Tujuan dan sasaran pada PK telah relevan dengan IKU yang sudah diformalkan, dan memuat sasaran yang diwujudkan dalam renstra, selaras dengan tugas dan fungsi dan menggambarkan core bussines, dan mencantumkan target kinerja secara periodic didalam dokumen rencana aksi. • Telah dilakukan monitoring secara periodic terhadap pencapaian hasil kinerja. • Target rencana aksi telah dijadikan dasar untuk memulai pelaksanaan kegiatan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan kegiatan dituangkan melalui notulensi/berita acara dan absen



NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
	seharusnya direviu secara berkala	mengevaluasi capaian output kegiatan organisasi. • Perjanjian Kinerja yang dibuat telah selaras dengan kinerja bawahannya.	
2	Perencanaan Kinerja Tahunan • Target kinerja seharusnya ditetapkan dengan baik; • Dokumen PK seharusnya selaras dengan RPJMD/Renstra; • Dokumen PK seharusnya menetapkan hal-hal yang seharusnya menetapkan hal-hal yang sssseharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas/fungsi); • Rencana Aksi seharusnya mencantumkan sub kegiatan/komponen rincian setiap periode yang akan dilakukan; • Target kinerja yang diperjanjikan seharusnya digunakan untuk mengukur keberhasilan; • Rencana aksi seharusnya		



NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
	<p>dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Perjanjian kinerja seharusnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		
2	<p>Pengukuran kinerja :</p> <p>a. Kualitas Pengukuran</p> <ul style="list-style-type: none">• Ukuran (indicator) kinerja eselon II dan IV seharusnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;• Indikator kinerja eselon III dan IV seharusnya selaras dengan indikator kinerja atasannya;• Seharusnya terdapat ukuran (Indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya;• Pengukuran kinerja seharusnya dilakukan secara berjenjang• Pengumpulan data kinerja seharusnya dapat diandalkan;• Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi seharusnya	<ul style="list-style-type: none">• IKU telah representative untuk mengukur kinerja yang seharusnya jumlahnya memadai dan menyimpulkan tercapainya kondisi yang seharusnya.• Telah memanfaatkan Pengukuran rencana aksi sebagai dasar untuk menyimpulkan progres, tindak lanjut untuk menyesuaikan strategis agar mencapai tujuan dan sasaran.	<ul style="list-style-type: none">• IKU menggunakan formula perhitungan yang telah ditentukan oleh PermantanRB



NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
	<p>dilakukan secara berkala</p> <ul style="list-style-type: none">• Pengukuran kinerja seharusnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi <p>b. Implementasi</p> <p>Pengukuran</p> <ul style="list-style-type: none">• IKU seharusnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;• IKU seharusnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;• Target kinerja eselon III dan IV seharusnya dimonitor pencapaiannya;• Hasil Pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas seharusnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment;• IKU seharusnya direviu secara berkala;• Pengukuran kinerja atas rencana aksi seharusnya digunakan untuk		



NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
	pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala;		
3	<p>Pelaporan Kinerja :</p> <p>a. Penyajian Informasi Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none">• Informasi kinerja dalam laporan kinerja seharusnya dapat diandalkan. <p>b. Pemanfaatan Informasi Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none">• Informasi kinerja seharusnya digunakan untuk :• Perbaikan perencanaan;• Menilai Serta memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;• Peningkatan kinerja;• Penilaian kinerja;	<p>c. IKU telah dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah atau sasaran utama dalam dokumen rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, penganggaran dan perjanjian kinerja serta sebagai alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.</p> <p>d. Laporan kinerja telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome serta informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan.</p> <p>e. Telah Terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya.</p>	<p>f. Pembahasan kegiatan dituangkan melalui notulensi/berita acara dan absen</p>
4	<p>Evaluasi Internal :</p> <p>a. Pemenuhan Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Seharusnya terdapat	<ul style="list-style-type: none">• Telah melakukan evaluasi terhadap rencana aksi.	<ul style="list-style-type: none">• Evaluasi rencana aksi telah melalui



NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
	<p>pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya;</p> <ul style="list-style-type: none">• Seharusnya dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi;• Hasil Evaluasi seharusnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. <p>b. Kualitas Evaluasi</p> <ul style="list-style-type: none">• Evaluasi program seharusnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program;• Evaluasi program seharusnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;• Pemantauan rencana aksi seharusnya dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja;• Pemantauan rencana aksi seharusnya memberikan alternative perbaikan yang dapat	<ul style="list-style-type: none">• Telah melakukan pemantauan rencana aksi secara periodic baik triwulan, semester dan tahunan.• Telah melakukan koordinasi yang baik terkait dengan pemantauan rencana aksi.	<p>pembahasan secara bertahap melalui rapat triwulan</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemantauan rencana aksi secara berkala dituangkan dalam bentuk laporan rencana aksi pertriwulan



NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	RENCANA AKSI
	<p>dilaksanakan;</p> <ul style="list-style-type: none">• Hasil evaluasi rencana aksi seharusnya menunjukkan perbaikan setiap periode; <p>c. Pemanfaatan Evaluasi Kinerja Internal</p> <ul style="list-style-type: none">• Hasil evaluasi program seharusnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang dan ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.		
5	<p>Pencapaian Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam pencapaian kinerja yang dilaporkan (output) atau (outcome) agar informasi mengenai kinerja dapat diandalkan, dan dilakukan perbaikan terhadap sasaran dan indikator kinerja yang kurang tepat dan belum menggambarkan hasil yang akan dicapai. ketersediaan sumber dokumen.	<ul style="list-style-type: none">• Informasi capaian sasaran kinerja organisasi harus telah memenuhi unsure tujuan/sasaran dan indikator kinerja yang SMART, mencapai target yang telah ditetapkan, tidak lebih buruk dari capaian kinerja tahun sebelumnya, kevalidan data capaian kinerja, dan ketersediaan sumber dokumen.	<ul style="list-style-type: none">• Setiap penanggung jawab program dan kegiatan telah menyampaikan laporan kegiatan



B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang dalam kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Permenpan RB No.5 Tahun 2018

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUNAN	TRIWULAN	TARGET	REALISASI	%
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,24	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	3,24	2,22	68,52

Keterangan : Realisasi merupakan hasil evaluasi SPBE Tahun 2019 dari Kemenpan RB

C. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja terkait dengan pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Pencapaian sasaran strategis yaitu *"Optimalisasi Tata Kelola Manajemen SPBE Yang Efektif Dan Efisien Serta Meningkatnya Layanan Infrastruktur SPBE Yang Terintegrasi"* pada tahun 2021 merupakan hasil pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :

Tabel 3.5 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,24	2,22	68,52

Pada tabel diatas menunjukkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021 belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu **3,24** dengan **predikat baik** sedangkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicapai adalah **2,22** dengan predikat **Cukup**. Hal ini dikarenakan IKU Diskominfo yaitu nilai Indeks SPBE tidak Sesuai Perpres 95 Tahun 2018, Indeks SPBE Tidak bisa dijadikan IKU Diskominfo melainkan menjadi capaian Gubernur.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020

No.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI		% Peningkatan /Penurunan Tahun 2019
			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5 = (4/3-1)*100	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	3,14	2,22	-0.3% (Penurunan)



Pada tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari tahun 2020 ke tahun 2021.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dengan Target RPJMD/RENSTRA

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir RPJMD/RENSTRA	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5 = 3/4*100	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2,22	3,40	65%

Dari tabel diatas, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2021 tercapai **2,22** dengan *predikat cukup*. Hasil Realisasi Tahun 2021 belum mencapai target Indeks yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu **3,14**. Hal ini dikarenakan IKU Diskominfo yaitu nilai Indeks SPBE tidak Sesuai Perpres 95 Tahun 2018, Indeks SPBE Tidak bisa dijadikan IKU Diskominfo melainkan menjadi capaian Gubernur.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional ;

Tabel 3.8 Realisasi Kinerja tahun 2019 dengan Standar Nasional

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Nasional	Realisasi	Lebih Kurang
1	2	3	4	5	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	2.22		

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab belum tercapainya kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Kaltim Tahun 2021 dalam mewujudkan Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE adalah ;

1. Faktor pendukung keberhasilan / kegagalan capaian kinerja

Kolaborasi antar Tim Koordinasi SPBE Biro Ortal, Bappeda, Diskominfo, BPKAD

**2. Permasalahan**

IKU Diskominfo yaitu nilai Indeks SPBE tidak Sesuai Perpres 95 Tahun 2018

3. Solusi

Indeks SPBE Tidak bias dijadikan IKU Diskominfo melainkan menjadi capaian Gubernur

4. Upaya

Di Tahun 2022 harus melibatkan kolaborasi Tim Koordinasi SPBE (Biro Ortal, Bappeda, BPKAD dan Diskominfo) untuk mencapai nilai Indeks SPBE

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yang sudah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Program/Kegiatan penunjang keberhasilan pernyataan kinerja.

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,04	2,22	68,52	Kabid Aplikasi dan Informatika, Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
	<i>1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah persentase layanan domain</i>	<i>persentase</i>	<i>25</i>	<i>110</i>	<i>100%</i>	Kabid Aplikasi dan Informatika, Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
	<i>Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>110%</i>	Kabid Aplikasi dan Informatika
	<i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase OPD yang memanfaatkan akses internet yang diamankan yang</i>	<i>PD</i>	<i>18</i>	<i>23</i>	<i>100%</i>	Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian



NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		<i>disediakan Dinas Kominfo dan terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>					
2	<i>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Persentase Implementasi e-government yang dilaksanakan</i>	<i>Persentase</i>	<i>50</i>	<i>100</i>	<i>100%</i>	Kabid Aplikasi dan Informatika, Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
	<i>Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Laporan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100%</i>	Kabid Aplikasi dan Informatika,
	<i>Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>Jumlah Laporan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100%</i>	Kabid Aplikasi dan Informatika,
	<i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>Jumlah laporan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100%</i>	Kabid Aplikasi dan Informatika,
	<i>Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi</i>	<i>Laporan</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>120%</i>	Kabid Aplikasi dan Informatika
	<i>Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur</i>	<i>PD</i>	<i>5</i>	<i>21</i>	<i>100%</i>	Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
	<i>Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah</i>	<i>Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah</i>	<i>Sistem Elektronik</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>100%</i>	Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian



NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	<i>Persentase perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi keamanan informasi</i>	<i>PD</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>100%</i>	Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	<i>Persentase perangkat daerah yang menerapkan koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik</i>	<i>PD</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>100%</i>	Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	<i>Persentase perangkat daerah yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah</i>	<i>PD</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>100%</i>	Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	<i>Persentase desiminasi informasi program dan kebijakan pembangunann pemerintah daerah melalui media komunikasi publik</i>	<i>Persentase</i>	<i>75</i>	<i>85</i>	<i>113%</i>	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik Dan Kehumasan
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1 <i>Jumlah Bimtek yang terlaksana</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>100%</i>	
		2 <i>Jumlah PPID di Kabupaten dan Kota</i>	<i>Perangkat Daerah</i>	<i>46</i>	<i>40</i>	<i>87%</i>	
		3 <i>Jumlah Kegiatan PRAHUM yang terlaksana</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>100%</i>	
		4 <i>Jumlah Sengketa yang diberikan melalui Media Komunikasi Publik</i>	<i>Sengketa Informasi</i>	<i>80</i>	<i>20</i>	<i>25%</i>	
		5 <i>Jumlah Kerjasama yang diselenggarakan dengan media Publik</i>	<i>Laporan</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>100%</i>	
		6 <i>Jumlah Bimtek yang terlaksana Kegiatan</i>	<i>Kegiatan</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>100%</i>	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Level Maturitas	<i>Level</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>66,67%</i>	Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian



NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
1	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	1 Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Titik	1	3	100%	
2	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Persentase perangkat daerah yang telah menerapkan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur	PD	22	22	100%	
		2 Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Kegiatan Strategis	1	3	100%	
		3 Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur	Sistem Elektronik	11	11	100%	
		4 Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Sistem Elektronik	30	30	100%	



NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	Persentase	50	100	100%	Kabid Statistik
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	1 Data Statistik Sosial	Dokumen	1	1	100%	
		2 Data Statistik Ekonomi	Dokumen	1	1	100%	
		3 Data Statistik SDA dan Infratraktur	Dokumen	1	1	100%	

D. Realisasi Anggaran

1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Optimalisasi tata kelola manajemen SPBE yang efektif dan efisien serta meningkatnya layanan infrastruktur SPBE yang terintegrasi	3,24	2,22	68,52	29.770.575.464,00	27.163.443.531,00	91,24



2. Realisasi anggaran perprogram dan kegiatan

Tabel 3.13 Realisasi Anggaran perprogram dan kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			PENANGGUNG JAWAB
		PAGU	REALISASI	% CAPAIAN	
1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.035.579.830	4.639.215.203	92,13	Kabid Aplikasi dan Informatika, Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
1.	<i>Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	2.065.535.550	2.007.190.650	97,18	
2.	<i>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	2.970.044.280	2.632.024.553	88,62	
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.945.822.400	6.520.589.337	93,88	Kabid Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	6.945.822.400	6.520.589.337	93,88	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	316.849.592	283.837.919	89,58	Kabid Teknologi Informasi Informatika dan Persandian
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	296.849.592	264.226.249	89,01	
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	20.000.000	19.611.670	98,06	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	953.673.080	918.125.641	96,27	Kabid Statistik
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	953.673.080	918.125.641	96,27	



BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur adalah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 . Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Tahun anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Gubernur maupun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama antar bidang kegiatan serta ketekunan dalam pengumpulan data informasi sangat diperlukan, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan stakeholders, sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.



B. Saran

Dari analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Tahun anggaran 2021, diperlukan saran-saran yang membangun antara lain :

- 1) Untuk menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diperlukan sinergitas antara Rencana Strategis (Renstra) dengan dokumen perencanaan lainnya, sehingga kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang dibiayai oleh APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.

- 2) Agar implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, sangat diperlukan komitmen yang kuat dari stakeholder dalam melaksanakan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja. Selain itu, segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan menghasilkan output maupun outcomes kegiatan yang terukur, bermanfaat dan akuntabel.